

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
(005.04.402283)

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa.muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN INTERIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

Telepon (0734)7420107, Faksimili (0734)7420108

Website: www.pa-muaraenim.go.id, e-mail: pamuaraenim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Muara Enim, 31 Desember 2021

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H

NIP 19640106.200112.1.001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
F. Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI. Lampiran	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, PALI DAN KOTA PRABUMULIH
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@ymail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Muara Enim, 31 Desember 2021

Sekretaris,

Syam Ratulangi, S.H

NIP 19640106.200112.1.001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1110.656.400,00 atau mencapai 263,00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 138.225.000,00 atau mencapai 99,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 139.650.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021 .

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.112.800,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar 3.112.800,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 3.112.800,00

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari operasi, surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 110.656.400,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 138.225.000,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.27.568.600,00). Kegiatan Non Operasional surplus sebesar Rp. 0,00 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar (Rp.27.568.600,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas semester/tahun pelaporan dibandingkan dengan semester/tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp. (Rp.27.568.600,00) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 (nihil) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 30.681.400,00 terdapat penurunan ekuitas sebesar Rp.3.112.800,00 sehingga ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. Rp.3.112.800,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Laporan Realisasi Anggaran**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% terhadap Anggaran	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	42.000.000	110.656.400,00	263,47	125.586.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		42.000.000,00	110.656.400,00	263,47	125.586.500,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Barang	B.3	139.650.000,00	138.225.000,00	98,98	49.750.000,00
Jumlah Belanja Operasi		139.650.000,00	138.225.000,00	98,98	49.750.000,00
JUMLAH BELANJA		139.650.000,00	138.225.000,00	98,98	49.750.000,00

NERACA

II. Neraca**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020***(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET LANCAR			
Persediaan		3.112.800,00	0,00
JUMLAH ASET		3.112.800,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas		3.112.800,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		3.112.800,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.112.800,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	110.656.400,00	125.586.500,00
JUMLAH PENDAPATAN		110.656.400,00	125.586.500,00
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	-	8.513.586,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	62.825.000,00	4.750.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.4	75.400.000,00	45.000.000,00
JUMLAH BEBAN		138.225.000,00	58.263.586,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(27.568.600,00)	67.322.914,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
SURPLUS /(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.5	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
Jumlah surplus/Defisit dari kegiatan Non operasional		0	0
surplus/defisit sebelum pos luar biasa		(27.568.600)	67.322.914
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(27.568.600,00)	67.322.914,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020***(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	-	6.056.560
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO	E.2	(27.568.600,00)	67.322.914,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI		0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	30.681.400,00	(73.379.474,00)
KENAIKAN/ (PENURUNAN) EKUITAS		3.112.800	6.056.560
EKUITAS AKHIR	E.4	3112800,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum Entitas
dan Rencana Strategis*

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tentang Bagan Akun Standar.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- n. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- p. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
- r. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Muara Enim

Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian visi dan misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Muara Enim sebagai visi dan misinya. Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung"
Misi Pengadilan Agama Muara Enim adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Meningkatnya akseptabilitas putusan Hakim.
3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Meningkatnya akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pengadilan Tingkat Pertama kelas I B Peningkatan kelas tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 Tanggal 9 Februari 2017, dengan wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). sedangkan wilayah hukum Prabumulih sudah terpisah dengan berdirinya Pengadilan Agama Prabumulih sesuai Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016. Sifat operasi pengadilan Agama Muara Enim adalah pelayanan publik di bidang penegakan hukum dan keadilan, sedangkan kegiatan pokok Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, mengadili, dan memutus perkara yang diterima.

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi***A.4. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Muara Enim menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar Pengukuran***A.5. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Muara Enim dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan Akuntansi***A.6. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai Perubahan Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah).

- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah

Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam

Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN.	100%

Penyusutan Aset
Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah.
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual
Pertama kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. **Pertama**, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. **Kedua**,

keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015. Akan tetapi untuk tahun berikutnya Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada tahun berjalan sudah dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Rp110.656.400,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 110.656.400,00 atau mencapai 263,47 persen dari estimasi pendapatan. Pendapatan Pengadilan Agama Muara Enim adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak yang terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2021

Uraian	2021		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Realisasi
Pendapatan Ongkos Perkara	24.000.000,00	40.495.000,00	168,73
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	18.000.000,00	70.161.400,00	389,79
Jumlah	42.000.000,00	110.656.400,00	263,47

Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.930.100,00 atau 11,89 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini karena adanya pandemic covid 19 yang membatasi jam layanan, sehingga perkara yang diterima Pengadilan Agama Muara Enim menjadi berkurang, dan secara signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan PNBP.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	40.495.000,00	43.200.000,00	(6,39)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	70.161.400,00	82.326.500,00	(14,78)
JUMLAH	110.656.400,00	125.586.500,00	(11,89)

Realisasi Belanja
Negara Rp
Rp138.225.000,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Muara Enim pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 138.225.000,00 atau 98,98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 139.650.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14.250.000	12.825.000	90
Belanja Jasa Konsultan	50.000.000,00	50.000.000,00	100
Belanja Perjalanan Biasa	75.400.000,00	75.400.000,00	100
Jumlah	139.650.000,00	138.225.000,00	99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 88.475.000,00 atau sebesar 177,84 persen dibandingkan realisasi belanja TA 2020 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena bertambahnya Anggaran Belanja barang di TA 2021 berupa Jasa Konsultan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	12.825.000,00	4.750.000,00	170,00
Belanja Jasa	50.000.000,00	-	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75.400.000,00	45.000.000,00	67,56
Jumlah	138.225.000,00	49.750.000,00	177,84

Belanja Barang
Rp 12.825.000,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.12.825.000,00 dan Rp.4.750.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.075.000,00 atau 170,00 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2020 pada periode yang sama.

Belanja Jasa
Rp 50.000.000,00

B.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 dan Rp 0,00. Realisasi belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.50.000.000,00 atau 100,00 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2020 pada periode yang sama.

Belanja Perjalanan
Dalam negeri
Rp 75.400.000,00

B.5 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.75.400.000,00 dan Rp.45.000.000,00. Realisasi belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.30.400.000,00 atau 67,56 persen dibandingkan realisasi belanja barang TA 2020 pada periode yang sama.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Rp3.112.800,00

Pengadilan Agama Muara Enim pada laporan keuangan BA 005.04 TA 2021 memiliki akun untuk disajikan ke dalam Neraca per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing berupa nilai persediaan sebesar Rp.3.112.800,00 dan Rp. 0,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp110.656.400,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya-LO sebesar Rp. 110.656.400,00 dan Rp. 125.586.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan 2020

URAIAN	T.A. 2021	T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Ongkos Perkara	40.495.000,00	43.260.000,00	(6,39)
Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya	70.161.600,00	82.236.500,00	(14,68)
Jumlah	110.656.600,00	125.496.500,00	-(11,82)

Beban Barang & Jasa
Rp.138.225.000,00

D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 138.225.000,00 dan Rp. 58.263.586.000,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN	T.A. 2021	T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	62.825.000,00	4.750.000,00	1.222,63
Jumlah	62.825.000,00	4.750.000,00	1.222,63

Beban Perjalanan
Dinas
Rp75.400.000,00

D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp.75.400.000 dan Rp. 45.000.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan sidang di luar gedung Pengadilan (sidang keliling) dan Isbat Terpadu.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

URAIAN	T.A. 2021	2020	NAIK TURUN (%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.400.000,00	45.000.000,00	0,68
Jumlah	75.400.000,00	45.000.000,00	0,68

*Surplus / (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00*

D.4 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TA 2021	TA 2020	NAIK TURUN (%)
Surplus/ (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(27.568.600,00)	0,00	(140,95)
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00
Surplus/ (Defisit) sebelum pos luar biasa	(27.568.600)	0,00	(140,95)
Pos Luar Biasa	0		
Surplus/Defisit-LO	(27.568.600)	0	(140,95)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal Rp0,00***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas per 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing adalah Rp. 0,00 dan Rp.6.056.560,00

*Defisit - LO
(Rp27.568.600,00)***E.2 Surplus/ (Defisit) LO**

Jumlah Surplus/(Defisit)-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. (27.568.600,00) dan Rp. 67.322.914,00. Surplus-LO merupakan selisih lebih antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, surplus/(defisit) kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp.30.681.400,00***E.3 Transaksi Antar Entitas**

Jumlah Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp30.681.400,00 dan (Rp. 73.379.474,00). Transaksi Antar Entitas merupakan selisih antara Realisasi Belanja netto (setelah dikurangi pengembalian belanja), Realisasi Pendapatan netto (setelah dikurangi pengembalian pendapatan) dan transaksi lainnya yang terkait dengan entitas lain.

*Ekuitas Akhir
Rp3.112.800,00***E.4 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.3.112.800,00 dan Rp. 6.056.560,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pengungkapan
Lainnya

F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Sampai dengan saat penyusunan Laporan Keuangan TA 2021, Pengadilan Agama Muara Enim belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), sehingga tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut terhadap temuan BPK.

F.2 Rekening Pemerintah

Selama Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Muara Enim hanya memiliki 1 (satu) rekening yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran BA 005.04 yaitu berupa Rekening Giro Nomor 8100124022831000 a.n. BPg 144 PA Muara Enim (04) di Bank Mandiri Cabang Muara Enim dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 (nihil).

F.3 Pengelolaan Dana Pihak Ke-3

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 03 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, bahwa seluruh biaya proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan Mahkamah Agung RI (*off balance sheet*). Saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 43.653.081,00 Sedangkan Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 56.777.381,00. Rincian biaya proses penyelesaian perkara dimaksud, sebagai berikut :

Rincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara TA 2021

Biaya Perkara	Biaya Eksternal	Biaya Lainnya	Biaya Lain-lain	Jumlah
69.006.000,00	-	-	-	69.006.000,00

Penjelasan mengenai biaya proses penyelesaian diatas antara lain :

a. Biaya Perkara

Biaya perkara ini dibayar oleh pihak yang berperkara yaitu pihak yang mengajukan gugatan/permohonan sebagai uang muka (panjar) biaya penanganan/penyelesaian perkara mereka di Pengadilan Agama. Pada

dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena Penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar, maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan. Dasar hukum biaya penanganan perkara perdata dibebankan kepada pihak sendiri diatur dalam HIR (*Het Herzien Inlands Reglemen, Staatsblad* tahun 1941 no 44) dan dalam R.Bg (*Reglement van het rechtswezen in de gewesten Buiten Java en Madoera*) *Staatsblad* 1927 no.227). Secara operasional terakhir diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012, tanggal 10 April 2012. Panjar Biaya Perkara ini terdiri dari : Biaya panggilan, Biaya sita, Biaya untuk mendukung proses penanganan perkara seperti penggandaan dokumen, penjilidan, dll serta Hak-hak Kepaniteraan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Biaya Eksekusi

Merupakan uang muka/panjar untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan Pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

c. Konsinyasi

Uang konsinyasi adalah dana yang dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar, karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran tidak mau menerima

d. Titipan dari Kepaniteraan Pidana.

Uang ini terdiri dari :

- Uang jaminan penangguhan penahanan.
- Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

e. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI).

F.4 Revisi DIPA

Total pagu anggaran yang dikelola oleh Pengadilan agama Muara Enim pada DIPA BA 005.04 TA 2021 adalah sebesar Rp139.650.000,00.

Selama Semester I TA 2021, DIPA BA 005.04 mengalami 1 (satu) kali revisi Dipa yaitu tanggal 12 Oktober 2021 Revisi hanya dilakukan pada Halaman III DIPA, yakni rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan.

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 KDUAPPAW : 005041100KD BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN
 KODE SATKER : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Tgl. Cetak 24/01/2022 10:27 PM
 lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,112,800	0	3,112,800	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	3,112,800	0	3,112,800	
JUMLAH ASET	3,112,800	0	3,112,800	

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,112,800	0	3,112,800	0.00
JUMLAH EKUITAS	3,112,800	0	3,112,800	
JUMLAH EKUITAS	3,112,800	0	3,112,800	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,112,800	0	3,112,800	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	Tanggal : 24/01/22 10:27
WILAYAH/PROVINSI	: 1100	SUMATERA SELATAN	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 402283	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	Prg ID : lap_lo_satker -
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110,656,400	125,586,500	(14,930,100)	(11.888)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	110,656,400	125,586,500	(14,930,100)	(11.888)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	110,656,400	125,586,500	(14,930,100)	(11.888)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	8,513,586	(8,513,586)	(100)
Beban Barang dan Jasa	62,825,000	4,750,000	58,075,000	1,222.632
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	75,400,000	45,000,000	30,400,000	67.556
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402283
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 24/01/22 10:27
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	138,225,000	58,263,586	79,961,414	137.241
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(27,568,600)	67,322,914	(94,891,514)	(140.95)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(27,568,600)	67,322,914	(94,891,514)	(140.95)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(27,568,600)	67,322,914	(94,891,514)	(140.95)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : D4 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : 1100 SUMATERA SELATAN
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LPE SATKER
Tanggal : 24/01/22 10:28 PM
Halaman : 1
Prg ID : lrp_pe_satker--rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	6,056,560	(6,056,560)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(27,568,600)	67,322,914	(94,891,514)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	30,691,400	(73,379,474)	104,060,874	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	3,112,800	(6,056,560)	9,169,360	-
EKUITAS AKHIR	3,112,800	0	3,112,800	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
 SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM 402283

Kode Lap : LRA.F.3
 Tanggal : 24/01/22 10:27 PM
 Halaman : 1
 Png ID : lap_fra_fao8_salkor_komparatif --

NO	URAIAN	2021						2020		
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	
		3	4	5	6	3	4	5	6	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0	
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	42,000,000	110,656,400	68,656,400	263	0	125,586,500	125,586,500	0	
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	42,000,000	110,656,400	68,656,400	263	0	125,586,500	125,586,500	260	
B	BELANJA				0				0	
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA BARANG	139,650,000	138,225,000	(1,425,000)	99	49,750,000	49,750,000	0	100	
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	139,650,000	138,225,000	(1,425,000)	99	49,750,000	49,750,000	0	100	
C	PEMBIAYAAN				0				0	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 24/01/22 10:28
Halaman : 1
Pg ID : lrp_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
BA(005) ES1(04) SUMATERA SELATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402283
JENIS SATUAN KERJA : KD

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	14,250,000	14,250,000	12,825,000	0	12,825,000	90	1,425,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14,250,000	14,250,000	12,825,000	0	12,825,000	90	1,425,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5221	Belanja Jasa	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0
522131	Belanja Jasa Konsultansi	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75,400,000	75,400,000	75,400,000	0	75,400,000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Biasa	75,400,000	75,400,000	75,400,000	0	75,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	139,650,000	139,650,000	138,225,000	0	138,225,000	98.98	1,425,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	139,650,000	139,650,000	138,225,000	0	138,225,000	98.98	1,425,000
	JUMLAH BELANJA							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 1100
SATUAN KERJA : 402283

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
SUMATERA SELATAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 24/01/22 10:28
Halaman : 1
Prig ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	24,000,000	40,495,000	0	40,495,000	168,73
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	18,000,000	70,161,400	0	70,161,400	389,79
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	42,000,000	110,656,400	0	110,656,400	263,47
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	42,000,000	110,656,400	0	110,656,400	263,47
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	42,000,000	110,656,400	0	110,656,400	263,47
	JUMLAH PENDAPATAN					



BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-142348/WPB.06/KP.144/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara LAHAT , yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2021.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SIAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	139,650,000	139,650,000	0
2	Belanja	138,225,000	138,225,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	42,000,000	42,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	110,656,400	110,656,400	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

A. Firdaus
NIP.196609271990111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran / Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP.196401062001121001

Laporan Hasil Rekonsiliasi
UAKPA: PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran

SiAP : 139,650,000

SAI/SA-BUN : 139,650,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan

SIAP : 42,000,000

SAI/SA-BUN : 42,000,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja

SIAP : 138,225,000

SAI/SA-BUN : 138,225,000

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 110,656,400

SAI/SA-BUN : 110,656,400

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SiAP : 0

SAI/SA-BUN : 0

Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

A. Firdaus
NIP.196609271990111001



An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran / Sekretaris
Pengadilan Agama Muara Enim



Syam Ratulangi, S.H
NIP.196401062001121001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronik, tidak dibutuhkan tanda tangan basah

REKONSILIASI DATA PAGU BELANJA ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tgl. Cetak 10/01/2022

BAES 1. Satker Kewenangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
00504.402283.KD	144	010.BF.1053.QBA	52	139,650,000	139,650,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				139,650,000	139,650,000	

REKONSILIASI DATA ESTIMASI PENDAPATAN ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
00504.402283	144	425233	24,000,000	24,000,000	SAMA
00504.402283	144	425239	18,000,000	18,000,000	SAMA
JUMLAH TOTAL			42,000,000	42,000,000	

REKONSILIASI DATA BELANJA ANTARA SiAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tgl. Cetak 10/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
00504.402283.KD	144	010.BF.1053.QBA	521219	12,825,000	12,825,000	SAMA
00504.402283.KD	144	010.BF.1053.QBA	522131	50,000,000	50,000,000	SAMA
00504.402283.KD	144	010.BF.1053.QBA	524111	75,400,000	75,400,000	SAMA
JUMLAH TOTAL				138,225,000	138,225,000	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN BELANJA ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tgl. Cetak 10/01/2022

BAES1.Satker.Kew enangan	KDKPPN	SD.Prog.Giat.Out	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SIAP	Ket
JUMLAH TOTAL				0	0	

REKONSILIASI DATA PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1,Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
00504.402283	144	425122	0	0	SAMA
00504.402283	144	425233	40,495,000	40,495,000	SAMA
00504.402283	144	425239	70,161,400	70,161,400	SAMA
JUMLAH TOTAL			110,656,400	110,656,400	

REKONSILIASI DATA PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT
SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SIAP	Ket.
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA MUTASI KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SiAP	Ket
00504.402283	144	111611	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	SIAP				SAI				Ket
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	
00504.402283	0	0	0	0	0	0	0	0	SAMA
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	

REKONSILIASI DATA SALDO KAS LAINNYA DARI HIBAH LANGSUNG ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1_Satker	SIAP			SAI			Ket	
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

REKONSILIASI DATA SALDO KAS BADAN LAYANAN UMUM ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Saiker	SIAP			SAI			Ket	
	Saldo Awal	Mutasi	Koreksi	Total	Saldo Awal	Mutasi		Koreksi
JUMLAH TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

REKONSILIASI DATA eRROR ANTARA SIAP DAN SAI TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SIAP	Ket
JUMLAH TOTAL			0	0	

REKONSILIASI DATA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BARANG/JASA/SURAT BERHARGA ANTARA SIAP DAN SAI
TINGKAT SATUAN KERJA

PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG (005)
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA (04)
UAKPA : PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM (402283)

Tanggal Cetak: 10/01/2022

BAES1.Satker	KDKPPN	Akun	Rupiah SAI	Rupiah SIAP	Ket.
JUMLAH TOTAL			0	0	



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA AKURASI DATA

BAGIAN KEUANGAN DAN BAGIAN UMUM

BAGIAN ANGGARAN 005.04 BADAN PERADILAN AGAMA

SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan Akurasi Data antara Bagian Keuangan dan Bagian Umum satuan kerja Pengadilan Agama Muara Enim, dengan per akun neraca untuk periode per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No.	Uraian	Neraca SIMAK-BMN	Neraca SAIBA	Selisih
A.	Aset Lancar			
1.	Persediaan	3.112.800,00	3.112.800,00	0,00
B.	Aset Tetap			
2.	Tanah	0,00	0,00	0,00
3.	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.	Ak. Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
5.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
6.	Ak. Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
7.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
8.	Ak. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
10.	Ak. Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
11.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
C.	Aset Lainnya			
12.	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
13.	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
14.	Ak. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Total	3.112.800,00	3.112.800,00	0,00

Operator SAIBA

Rahmi Oktaria, S.H.I

NIP.198010072011012005

Operator SIMAK BMN

Ary Puspita Yudha, S.T.

NIP. 198312192012121002



Mengetahui,
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H

NIP.196401062001121001

Menyetujui
Kasub Bag Umum dan Keuangan

Rahmi Oktaria, S.H.I

NIP. 198010072011012005



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA BAGIAN ANGGARAN 005.04 BADAN PERADILAN AGAMA PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM NOMOR : W6-A5/ 915/KU.01/XII/2021

Pada hari ini Jum'at , tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2021, bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Ary Puspita Yudha, S.T.
NIP : 198312192012121002
Jabatan : Operator SIMAK BMN
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Unit Akuntansi Barang pada Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Operator SAIBA
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Unit Akuntansi Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Agama Muara Enim dengan cara membandingkan data BMN Kuasa Pengguna (KP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca Belanja Modal	Nilai BMN Periode 01 Desember s/d 31 Desember 2021		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
1	2	3	4	(5) = (3) + (4)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	0,00	3.112.800,00	3.112.800,00
B	ASET TETAP			
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
C	ASET LAINNYA			
1	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
D	SUB JUMLAH (A+B+C)	0,00	3.112.800,00	3.112.800,00
E	Ekstrakomptabel	0,00	0,00	0,00
F	TOTAL (D+E)	0,00	3.112.800,00	3.112.800,00

Rincian terlampir



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1 Telp. 0734-7420107 Fax. 0734-7420108

Muara Enim - Sumatera Selatan 31311

www.pa-muaraenim.go.id e-mail : pa.muaraenim@gmail.com

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode 01 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator SAIBA

Rahmi Oktaria, S.H.I

NIP.198010072011012005

Operator SIMAK BMN

Ary Puspita Yudha

NIP. 198709142015032002



Mengetahui,
Sekretaris

Syam Ratulangi, S.H

NIP. 196401062001121001



BERITA ACARA PEMERIKSAAN OPNAME FISIK PERSEDIAAN
Nomor : W6-A5/914/KU.01/XII/2021

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, kami yang bertandatangan di bawah ini, Panitia *opname fisik* Persediaan:

1. Nama : Rahmi Oktaria, S.H.I.
NIP : 198010072011012005
Jabatan : Kasub Bag Umum dan Keuangan
2. Nama : Ari Puspita Yudha, S.T
NIP : 198709142015032002
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan *opname fisik* persediaan Semester II Tahun 2021 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam Hasil Opname Fisik.

Demikian Berita Acara Opname Fisik Persediaan ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (*Opname Fisik*)

1. Rahmi Oktaria, S.H.I.

2. Ary Puspita Yudha, S.T



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

HASIL OPNAME FISIK

Nama Satker : Pengadilan Agama Muara Enim
Kode Satker : 402283
UAPPB-W : 11.00
UAPPB-E1 : 005.04

No	Nama Barang	Kode Barang	Kuantitas Barang		Selisih	Kondisi		
			Laporan Persediaan	Hasil Cek Fisik		Baik	Usang	Rusak
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Blanko Akta Ceral	1010399999002	24	24	-	Baik	-	-

Tim Pelaksana Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan
(Opname Fisik)

1. Rahmi Oktaria, S.H.I ()
2. Ary Puspita Yudha, S.T ()



Mengetahui,
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Muara Enim

Syam Ratulangi, S.H
NIP. 19640106.200112.1.001

DAFTAR KELOMPOK BERGABUNG BAYAN BERSAMA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PERIODE 31 DESEMBER 2021

NO	NAMA BERGABUNG	N/2	BA 001	JURUSAN	KODE BERGABUNG	NAMA BERGABUNG	BAHAN	NO/NIK/NIK/NIK	TARICHAL SUR BERGABUNG	STATUS TYP/RELOM TYP	KALAU KELOMPOK BERGABUNG
1	Pengadilan Agama Muara Enim	00E	01	Pengantar Formal	65304402031000	Bdg 144 PA MUARA ENIM (01)	BRI Cabang Muara Enim	5-37324996 L180467020	18/10/2020	REP	RENTIL
2	Pengadilan Agama Muara Enim	00E	04	Pengantar Formal	89012402031000	Bdg 144 PA MUARA ENIM (04)	Bank Mandiri Cabang Muara Enim	5-30224995 1187367020	18/10/2020	REP	RENTIL



31 Desember 2021
 Pengadilan Agama Muara Enim
 Nomor: 001/2021/PA/Ag. Mu. Enim
 001/2021/PA/Ag. Mu. Enim

SAFTAR KESENTERO BUDIDAGARA PERSEKOLAH SAKTIAN KEBAYA PENGAGILAS AGAMA RIWANA BIKOW
PERIODE 31 DESEMBER 2021

NO	BATTUM BELJA	K/TA	BA 201	JERUS BOK	NOMOR PERUBERBU	KAMA KENKERING	BANAL	NOMOR GUBAT LON	KANDAGALON DESENTERO	STATUS TPA/ BELJEM TPA	BALOT REKONTERO BOKLAN
				IV	I	II	I	L			



 31 Desember 2021
 Kepala Pengabdian Agama Muzes Ehim

Muaraung, S.H
 08108.208.33.108

DAFTAR BEKERTING PERKASA DAN BEKERTING PERHARA LAIBNYA SAMA BERJA PADA PERKORAN AGAMA MUARA ENIM
 PERIODE 31 DESEMBER 2021

NO	MANTAR KERJA	K/L	DA-201	JENIS PEK	NOMOR KEKERTING	SAMA KEKERTING	BANK	NOMOR BUDGET LEM	TANGGAL LEM KEKERTING	STATUS TWP/RESKOW TWP	KALAO KEKERTING KORNAS
1	PENGABDIAN AGAMA MUARA ENIM	003	4	GRUB	7752488070	RPL 144 PA MUARA ENIM UTK POT BIAYA PERKARA	Bank Syariah Indonesia KCP Muara Enim	3-558/WP8.07AP.09.0021	26-06-21	TWP	43.653.081,00

Muara Enim, 31 Desember 2021
 Sekretaris Pengabdian Agama Muara Enim



Syahrudin, S.H
 NIP. 26400963001121001

**MONITORING PINTUPAN REKENING BANK PADA WILAYAH SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

No	Satuan Kerja	K/L	BA-ES1	Jenis Rekening	Noomor Rekening	Nama Rekening	Bank/Kantor Pos	Nomor Surat Penutupan	Status TNP	Saldo Akhir per 31 Des 2021 (Rp.)
1	Pengadilan Agama Muara Enim	005	01	Giro	0128-01-000018-30-8	B/Pg 144 PA Muara Enim (01)	BRI Cabang Muara Enim	S-709/PA.3/2021 14 April 2021	TNP	0,000
2	Pengadilan Agama Muara Enim	005	04	Giro	112-00-0001818-2	B/Pg 144 PA Muara Enim (04)	Mandiri KCP Muara Enim	S-785/PA.3/2021 13 April 2021	TNP	0,000
3	Pengadilan Agama Muara Enim	005	04	Giro	770208807	RFL 144 PA MUARA ENIM UTE POT BIAYA PERAKASA	B/WI Syarifah Cabang Muara Enim	WE-AS/3062/KLL/01/06/2021 29 September 2021	TNP	0,000



 Muara Enim, 31 Desember 2021
 Kepala Pengadilan Agama Muara Enim

Jember, 30 Desember 2021
 S.H
 19640106.200112.1.001

**DATA KEUANGAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2021**

No. Urut	Nama Satker/Pengadilan	Saldo Akhir per 31 Desember 2021				Jumlah	Keterangan
		Biaya Perkara 3	Biaya Eksekusi 4	Konsinyasi 5	Lain-lain 6		
1.	Pengadilan Agama Muara Enim	Rp 69.006.000,00	-	Rp -	Rp -	Rp 69.006.000,00	8





PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pamuaraenim@gmail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA TINGKAT PERTAMA TRIWULAN IV PER 31 DESEMBER 2021 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Induk Keuangan Perkara Tingkat Pertama ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Perkara :	
1. Penerimaan	= Rp 235.258.000,00,-
2. Pengeluaran	= Rp 166.252.000,00,-
3. Saldo Buku Induk Keuangan Perkara	= Rp 69.006.000,00,-
B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :	
1. Uang Pada Brankas	= Rp 25.352.919,00,-
2. Saldo di Bank BSI	= Rp 43.653.081,00,-
3. Selisih	= Rp -
4. JumlahSeluruhnya	= Rp 69.006.000,00,-

Rincian Uang Tunai / Kas :

1) Lembar Uang Kertas @ Rp 100.000 = 253 Lb = Rp 25.300.000,00,-	
Lembar Uang Kertas @ Rp 50.000 = 1 Lb = Rp 50.000,00,-	
Lembar Uang Kertas @ Rp 2.000 = 1 Lb = Rp 2.000,00,-	
Sub Jumlah	= Rp 25.352.000,00,-
2) Keping Uang Logam @ Rp 500= 1 Kp = Rp 500,00,-	
Keping Uang Logam @ Rp 200= 2 Kp = Rp 400,00,-	
3) Materai	NIHIL
4) Saldo Bank	= Rp 43.653.081,00,-
Jumlah Seluruhnya	= Rp 69.005.981,00,-
Selisih	= Rp 19,00,-
	= Rp 69.006.000,00,-

Catatan :

Terdapat Selisih sebesar Rp 19,00 karena kesulitan pengadaan Uang Pecahan.

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Drs. Husaini, S.H., M.H.

Panitera

Drs. Efendi



**BERITA ACARA PENUTUPAN
BUKU KONSINYASI
TRIWULAN IV
PER 31 DESEMBER 2021
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Konsinyasi ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Konsinyasi :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Penerimaan | = NIHIL |
| 2. Pengeluaran | = NIHIL |
| 3. Saldo Buku Induk Eksekusi | = NIHIL |

B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Uang Pada Brankas | = NIHIL |
| 2. Saldo di Bank BSI | = NIHIL |
| 3. Selisih | = NIHIL |

Jumlah Seluruhnya = NIHIL

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Drs. Hysaini, S.H., M.H.

Panitera

Drs. Efendi



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

WILAYAH HUKUM KABUPATEN MUARA ENIM, DAN KABUPATEN PALI
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1 Telepon (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108 Muara Enim 31312
Website: www.pa-muaraenim.go.id Email: pa.muaraenim@gmail.com

BERITA ACARA PENUTUPAN BUKU INDUK KEUANGAN EKSEKUSI TRIWULAN IV PER 31 DESEMBER 2021 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Buku Induk Keuangan Eksekusi ditutup dengan rincian sebagai berikut :

A. Buku Induk Keuangan Perkara :

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Penerimaan | = NIHIL |
| 2. Pengeluaran | = NIHIL |
| 3. Saldo Buku Induk Keuangan Eksekusi | = NIHIL |

B. Keadaan Uang Riil sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Uang Pada Brankas | = NIHIL |
| 2. Saldo di Bank BSI | = NIHIL |
| 3. Selisih | = NIHIL |

JumlahSeluruhnya = NIHIL

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Muara Enim



Dr. Husaini, S.H., M.H.

Panitera

Drs. Efendi

RINCIAN NILAI KAS PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PER 31 DESEMBER 2021

RA : 005 Mahkamah Agung RI
 ESELON I : 006 Badan Pengadilan Agama
 UJARA : 402283 Pengadilan Agama Muara Enim

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2021		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan
			Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening		Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	4	5	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	8100124022831000	-	NIHIL	112-00.0081818.2	-

KAS DI BENDAHARA PENYERAHAN

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2021		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan
			Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening		Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	4	5	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	-	-	NIHIL	-	-

KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

No.	Kode Satuan Kerja	Nama Satuan Kerja	Saldo Per 31 Desember 2021		Keterangan	Saldo Per 31 Desember 2020		Keterangan
			Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening		Jumlah	Tarif/ Nomor Rekening	
1	2	3	4	5	6	4	5	9
1	402283	Pengadilan Agama Muara Enim	NIHIL	-	-	NIHIL	-	-



Muara Enim, 31 Desember 2021

NIP. 196410106-200112-1-001

**BUKU INDIK KEUANGAN PERAKA
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
PER 31 DESEMBER 2021**

NO UNIT	TANGGAL TRANSAKSI	NO PERAKA	PABAY		PANGULAN	PENERIMA	SITA	PENGESAHAN BERKAS	SUKAH	PENGANTARAN	PENGIRIAN SIAVA	DAVA PROSES	MATERI	HAK-HAK KEPARTERIMAAN	PSP	LAIN-LAIN	JUMLAH PENGELUARAN	NET
			JENIS	JUMLAH														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Saldo Awal		129.275,000														
422	28/12/2021	102/194/2021/PAJAE	Tk. Perikma							1.000,000			10,000	20,000	20,000		501,000	
423	28/12/2021	102/194/2021/PAJAE	Tk. Perikma							200,000			10,000	5,000			200,000	
424	28/12/2021	104/178/2021/PAJAE	Tk. Perikma							101,000			10,000	20,000			190,000	
		JUMLAH PENERIMAAN DESEMBER 2021		96.261,000	48.421,000					21.201,000	200,000	3.428,800	1.261,000	5.628,000	88.871,600		184.352,000	
		SALDO AWAL		129.194,000													88.196,000	
		TOTAL SALDO		233.258,000													233.258,000	

Penerima Sisa Kas Sebagai Berikut :

- 1. Lembar Uang Kertas @ Rp 100.000 = 251 Lp = Rp25.100.000,-
Lembar Uang Kertas @ Rp 50.000 = 1 Lp = Rp 50.000,00
Lembar Uang Kertas @ Rp 20.000 = 11 Lp = Rp 2.000,00
Sisa Jumlah = Rp 27.100.000,-
- 2. Keping Uang Logam @ Rp 500 = 1 Rp = Rp 500,00
Keping Uang Logam @ Rp 200 = 2 Rp = Rp 400,00
Sisa Jumlah = Rp 900,00
- 3. Metersal
Sisa Saldo Bank = Rp 43.653.041,00,-
= Rp 69.025.981,00,-
= Rp 19.870,-
= Rp 69.045.851,00,-

Catatan:
Indikator saldo kas benar berdasarkan pengaduan yang diterima

Untuk lebih lanjut mengenai "Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan" dapat dilihat pada Buku Indik Keuangan Pengadilan Agama Muara Enim yang terdapat di dalam website berikut :

Alamat Sisa Mencajarkan Kas
Alamat Sisa Mencajarkan Kas
Rp 181.005.000,00,-
Rp 42.800.000,00,-

Mengetahui
Kepala Pengadilan Agama Muara Enim

NIP. 1967071962011901

Muara Enim, 31 Desember 2021
Pencatat

NIP. 19670211966011902

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA / SATKER (NON BLU)
PERIODE 31 DESEMBER 2021**

BA : 005 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 ESELON I/ UAPPA-E1 : 04 BADAN PERADILAN AGAMA
 UAPPA-W : 11 00 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 SATUAN KERJA/ UAKPA : 402283 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. LRA, Neraca, LO dan LPE face	v	Ada
2. Catatan atas Laporan Keuangan	v	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		
	Ada	Tidak
		Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	v	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	v	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	v	Ada
4.		Ada
5.		Ada
<i>UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dapat menambahkan Laporan yang harus disampaikan/dilampirkan dalam LK UAKPA/Satker sesuai dengan kebutuhan UAPPA-W/UAPPA-E1/UAPA dalam penyajian dan pengungkapan LKKL.</i>		
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon & LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020 ?	v	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon & LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
PENGGUNAAN APLIKASI		
	Ya	Tidak
		Seharusnya
1. Apakah seluruh Aplikasi (Persediaan, SIMAK BMN dan SAIBA) telah menggunakan versi paling akhir ?	v	Ya
<i>Apabila tidak menggunakan aplikasi versi terakhir dimungkinkan terdapat perbedaan posting rule yang berdampak pada penyajian laporan keuangan.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ya	Tidak
		Seharusnya
1. Pada Laporan Neraca Face: Apakah Total Aset sama dengan Total Kewajiban ditambah Total Ekuitas ? (Aset = Kewajiban + Ekuitas)	v	Ya
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
		Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	v	Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	v	Sama

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? Cek juga di e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Akun Non Ref"		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang"		√	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
2. Adakah akun "Belum Diregister" ? Dalam LK Tahunan tidak boleh ada akun "Belum diregister"		√	Tidak
AKUN Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/5/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?			Ya/Tidak
3. Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?			Ya
<i>Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL.</i>			
4. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 ?			Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
Transfer Masuk (TM) 313221 dan Transfer Keluar (TK) 313211			
1. Nilai selisih TK/TM (excel e-Rekon&LK) secara Absolut	Rp.		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>			
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp.		

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Akun Pendapatan Bukan Pajak (42xxxx)			
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx (Akun 423xxx tidak boleh ada)		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan)		√	Tidak
2. Adakah akun 425719 Pendapatan Bunga Lainnya DI KL? (seharusnya 425764 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)			
1. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)			
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
Akun BLU yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan frasa "BLU"		√	Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	-		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	-		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar.</i>			

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak

Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO		√	Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?		√	Tidak
2. Apakah Nilai "Selisih Revaluasi Aset Tetap" sama dengan Laporan Hasil IP (LHIP) dari DJKN?	√		Ya
3. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama

Apabila perhitungan no.3 menghasilkan "tidak sama" berarti melakukan jurnal menggunakan akun 391111 (perbaiki)

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cetak seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah telah dibuat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN (Kec. Kemlu)	√		Ya
2. Apakah ada akun "Belum Diregister" ?		√	Tidak
3. Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	√		Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
<i>Mulai tahun 2020 dengan e-Rekon & LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?		√	Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?		√	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca		√	Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Tahunan 2021?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-ik menu daftar >> pagu minus</i>)		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
7. Adakah TDK Kas Hibah		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			

Pengecekan TDK Hibah dengan SPAN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah TDK Hibah Langsung dengan SPAN? <i>Data selain dilihat dari SPAN, juga dapat diperoleh dari Dit. APK, DJPB.</i>		√	Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
7.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
6. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	√		Ya
7. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui

Pengab. Penyusun LKKL,

(Syam Ratulangi, S.H)

NIP. 19640106.200112.1.001

Muara Enim, 31 Desember 2021

Penelaah,

(Rahmi Oktaria, S.H.I)

NIP .19801007.201101.2.005